



KEMENTERIAN PPN/ BAPPENAS REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN HASIL KEGIATAN
PERTEMUAN PENYUSUNAN *GOVERNMENT SELF ASSESSMENT REPORT*
(GSAR) OPEN GOVERNMENT INDONESIA 2017**

A. Pelaksanaan

Hari/ Tanggal : Selasa, 23 Oktober 2018
Waktu : 09-00-12.00 WIB
Tempat : Ruang Cemara II, Hotel Cemara
Jalan Wahid Hasyim No.69, Jakarta Pusat

B. Narasumber :

1. Dr. Velix V. Wanggai (Direktur Aparatur Negara, Kementerian PPN)
2. Husni Rohman, S.IP (Kasubdit Kualitas Pelayanan Publik, Kementerian PPN)

C. Peserta Rapat :

1. Kementerian/ Lembaga
2. Organisasi Masyarakat Sipil

D. Pendahuluan

Sehubungan dengan komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan Open Government Partnership (OGP) sejak tahun 2011 untuk mewujudkan pemerintah yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Salah satu bentuk bahwa Indonesia menyelenggarakan Open Government adalah dengan menyusun rencana aksi dua tahunan. Saat ini, sudah keempat kalinya Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah dibuat.

Serangkaian kegiatan konsultasi dan pertemuan telah dilakukan dalam proses finalisasi komitmen. Pada tahapan awal, Sekretariat Open Government Indonesia (OGI) telah

melakukan konsultasi kepada organisasi masyarakat sipil terkait dengan tantangan pelaksanaan keterbukaan pemerintah di Indonesia pada bulan Mei 2018.

Sebagai bentuk ko-kreasi yang menjadi prasyarat pelaksanaan OGI, pada 23 Oktober 2018 Sekretariat OGI menyelenggarakan pertemuan finalisasi Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah 2018-2020 di Hotel Cemara. Tujuan dari penyelenggaraan acara ini adalah untuk mendapatkan masukan akhir dari Kementerian/Lembaga maupun dari CSO terhadap draft Renaksi OGI.

Selain pertemuan finalisasi Renaksi, pada hari yang sama juga diselenggarakan pertemuan pembekalan delegasi RI untuk kegiatan Open Government Regional Meeting. Pertemuan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi terkait susunan acara dan berbagai persiapan yang dibutuhkan pada saat pertemuan regional berlangsung.

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pertemuan Finalisasi Renaksi Open Government Indonesia 2018-2020

- Pertemuan finalisasi Renaksi OGI 2018-2020 merupakan bagian dari pertemuan pembahasan renaksi OGI yang sebelumnya dilakukan yakni kegiatan kick off meeting dan pertemuan bilateral yang telah diselenggarakan di Bappenas.
- Sedikitnya 15 pertemuan bilateral, 11 pertemuan konsultasi dengan CSO dan lebih dari 12 pertemuan konsultatif dengan Kementerian/ Lembaga telah dilaksanakan dalam rangka menyempurnakan proses finalisasi renaksi OGI ini.
- Antusiasme Kementerian/ Lembaga dan CSO mewarnai pertemuan finalisasi tersebut, sejumlah 93 orang hadir dalam ruang pertemuan untuk turut berkontribusi mempertajam Rencana Aksi.
- Berikut terlampir hasil pertemuan finalisasi Renaksi OGI:

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
1.	Implementasi Data Kepemilikan Manfaat (Beneficial Ownership) yang terintegrasi dan dapat diakses oleh publik	Tidak ada respon	Tidak ada respon
2.	Menyediakan Informasi dan Data Penerima Bantuan Iuran yang Partisipatif	Kementerian Sosial: Tidak ada respon tambahan, mohon diberi waktu 1 Minggu untuk membicarakan di internal Kemensos	MediaLink: Tidak ada respon
3.	Meningkatkan Keterbukaan Data Anggaran Pendidikan,	a. Kementerian Keuangan: - Tidak ada respon tambahan, namun mohon	Seknas FITRA: Sudah bagus dan tidak ada respon tambahan, hanya

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
	Kesehatan dan Penanggulangan Kemiskinan di Kementerian/Lembaga dan Daerah	<p>Biro Perencanaan dan Keuangan diundang sekali lagi untuk tahap finalisasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muncul pertanyaan mengapa target Renaksi tahun ini berjangka 3 tahun (2018-2020) <p>b. Kementerian Dalam Negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk pelaksanaan Renaksi tahun 2018 apakah dimulai saat triwulan keempat (B12)? - Implementasi E-Budgeting akan lebih dioptimal dilaksanakan pasca rampungnya revisi PP No. 58/ 2005 dan Permendagri No. 13/2006 	perlu diperhatikan saat implementasi Renaksi tersebut
4.	Pemanfaatan Neraca Pendidikan Daerah untuk Perencanaan Anggaran Pendidikan Partisipatif	<p>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejauh ini belum ada permintaan tertulis untuk merespon Renaksi 2018-2020 - Untuk sosialisasi halaman NPD, Otonomi Daerah membawa konsekuensi sulitnya Pusat untuk mengintervensi sampai ke tingkat daerah karena kewenangan urusan pendidikan berada di tangan Provinsi dan Kab/Kota masing-masing - Untuk penyelenggaraan Forum Konsultasi Pengawasan Anggaran, 	<p>Transparency International Indonesia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sudah lebih dari 3 kali pertemuan membahas Renaksi ini namun tak kunjung menemukan kesepakatan - NPD merupakan inisiatif yang sangat baik, perlu dengan cepat dirumuskan target berapa daerah yang menjadi <i>pilot project</i> pemanfaatan NPD - Permasalahan antar-direktorat yang berpotensi menghambat implementasi Renaksi perlu ditangani

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
		nomenklatur perlu diubah dari ' <i>oleh masyarakat</i> ' menjadi ' <i>dengan masyarakat</i> '.	
5.	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Desa yang Akuntabel	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Tidak ada respon tambahan, dan untuk roadmap pendampingan Desa sebenarnya Kemendes sudah pernah membuat dokumennya	PATTIRO dan WVI: Sepakat dengan indikator tertulis
6.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah melalui Portal E-Legislati	Kementerian Dalam Negeri: Perlu dirumuskan jumlah Kab/Kota yang menjadi pilot project implementasi platform E-Legislati	IPC: Tidak ada respon
7.	Integrasi Data untuk Peningkatan Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada	Komisi Pemilihan Umum: Tidak ada respon	Perludem: Perludem telah mendorong KPU agar menyetujui Renaksi ini, namun tidak ada respon yang berarti karena terkendala karena kesibukan KPU dalam mempersiapkan Pemilu 2019 dan Pilkada Serentak
8.	Publikasi Informasi yang Valid terkait Ketersediaan Layanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Milik Pemerintah	Kementerian Kesehatan: Terdapat catatan perbaikan mengenai poin Renaksi dan indikator capaian yang akan dikirim via E-Mail	ICW: Berbagai catatan dari ICW dalam beberapa rapat bilateral mohon dapat dijadikan pertimbangan
9.	Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik di Kementerian/Lembaga	Kementeriaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: - Dalam menyusun Renaksi, KemenPAN-RB	YAPPIKA-Action Aid: Tidak ada respon tambahan, namun perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas tata cara kerjasama dan koordinasi

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
		<p>tak hanya berkoordinasi dengan YAPPIKA Action-Aid tapi juga dengan berbagai CSO lain sehingga perlu dirancang mekanisme koordinasinya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk target B-12 tahun 2018 disesuaikan dengan target kerja yang telah disusun oleh KemenPAN-RB 	antara KemenPAN-RB dan CSO
10.	Peningkatan Kualitas Penyelesaian Pengaduan Pelayanan Publik dalam LAPOR!-SP4N	<p>Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam menyusun Renaksi, KemenPAN-RB tak hanya berkoordinasi dengan YAPPIKA Action-Aid tapi juga dengan berbagai CSO lain sehingga perlu dirancang mekanisme koordinasinya - Untuk target B-12 tahun 2018 disesuaikan dengan target kerja yang telah disusun oleh KemenPAN-RB 	<p>YAPPIKA-Action Aid:</p> <p>Tidak ada respon tambahan, namun perlu dilakukan pertemuan lanjutan untuk membahas tata cara kerjasama dan koordinasi antara KemenPAN-RB dan CSO</p>
11.	Pengembangan Sistem Layanan Pengelolaan Pengaduan dan Pengawasan Satu Pintu Pada Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	<p>Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada respon tambahan terkait Renaksi - Untuk pertemuan ke depan, Biro Humas KLHK perlu lebih banyak dilibatkan karena sebagai focal point Renaksi ini - Untuk integrasi sistem pengaduan dengan 	<p>ICEL:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada hal yang baru dengan sasaran <i>'Ditindaklanjutiya pengaduan masyarakat melalui LAPOR!-SP4N'</i> karena memang sudah terjadi - Seharusnya terlebih dahulu disasar implementasi pengelolaan pengaduan

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
		<p>LAPOR!, sudah ada draft SK Sekjen KLHK tentang Tim Pengarah LAPOR! di KLHK beserta draft dokumen SOP tata kelolanya</p> <ul style="list-style-type: none"> - KLHK telah mencoba integrasi sistem dengan LAPOR! pada tahun 2017, namun saat itu belum ada respon dari KSP meskipun setuju dengan adanya integrasi sistem internal antara Tenurial, Gakkum, dan Inspektorat Jenderal 	<p>satu pintu yang menyatukan sistem pengaduan internal antara Tenurial, Gakkum dan Inspektorat Jenderal</p>
12.	Peningkatan Transparansi terhadap Proses Pengadaan Barang dan Jasa	<p>a. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam implementasi transparansi pengadaan barang/jasa, tidak semua badan publik menggunakan SPSE karena tak ada sanksi yang mengikat meskipun sudah ada landasan hukum berupa Peraturan Presiden - Sesungguhnya LKPP telah memiliki data belanja Badan Publik karena terekam dalam SPSE yang harus diumumkan sebelum tahun anggaran berakhir - Salah satu daerah yang dapat dijadikan contoh adalah Kota Surabaya yang menerapkan sistem 	<p>ICW: Perlu dirumuskan Surat Edaran Kemendagri yang mewajibkan daerah menyusun DIP Pengadaan Barang/Jasa karena memiliki daya mengikat lebih besar kepada Pemerintah Daerah dibanding edaran atau himbauan dari LKPP atau KIP</p>

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
		<p>GRMS, yang mana sistem tersebut dapat diduplikasi ke daerah lain</p> <p>b. Komisi Informasi Publik:</p> <p>Perlu dirumuskan dokumen kontrak mana saja yang wajib dipublikasikan sehingga tidak menimbulkan kerancuan, dan regulasi tersebut diragamkan ke seluruh daerah</p>	
13.	Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Keterbukaan Pemerintahan Indonesia	Tidak ada respon	Tidak ada respon
14.	Pengarusutamaan Nilai-Nilai Open Government pada Pelaksanaan Smart City	<p>Kementerian Komunikasi dan Informatika:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sejauh ini Kemkominfo belum pernah dilibatkan dalam pembicaraan mengenai Renaksi ini sehingga cukup kaget ketika diikutsertakan dalam rapat finalisasi - Perlu dirumuskan mekanisme/tata kerja dari Renaksi ini agar tak terjadi tumpang tindih antara kerja Kemkominfo dan Seknas OGI dalam melakukan assesmen ke daerah 	<p>TII, ICW, MediaLink, INFID, IPC:</p> <p>Tidak ada respon</p>
15.	Digitalisasi Permohonan Informasi Publik	<p>Komisi Informasi Pusat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ada respon tambahan mengenai Renaksi - Melalui berbagai langkah yang tercantum dalam indikator capaian, 	<p>Open Data Lab:</p> <p>Kedepannya perlu terus dilakukan koordinasi dengan tim Satu Data Indonesia (SDI) seiring dengan hadirnya Peraturan Presiden tentang SDI</p>

No.	Aksi	Respon Pemerintah	Respon CSO
		diharapkan agar tercipta <i>single window</i> yang memudahkan pengajuan permohonan informasi publik	

2. Pertemuan Pembekalan Delegasi Regional Summit 2018

- a. Sekretariat Nasional Open Government Indonesia memaparkan sesi dan jadwal yang akan diikuti oleh delegasi Indonesia pada Open Government Partnership Asia Pacific Regional Meeting 2018 di Seoul, Korea Selatan.
- b. Direktur Aparatur Negara menghimbau agar seluruh delegasi dapat memanfaatkan event ini sebagai kegiatan yang bermanfaat khususnya knowledge-sharing yang terdapat dalam sesi-sesi OGP Korea.
- c. Perlu adanya koordinasi lebih lanjut dengan membuat Whatsapp Group terkait Delegasi Indonesia untuk memudahkan distribusi informasi.
- d. Seknas OGI menyarankan agar rekan-rekan delegasi Indonesia dapat segera memproses registrasi OGP dan mengurus visa Korea Selatan.
- e. Seknas OGI agar berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Seoul terkait kedatangan delegasi Indonesia ke Korea Selatan

Kesimpulan dan Tindaklanjut

1. Tahapan selanjutnya pasca pertemuan finalisasi, tim OGI akan melakukan konfirmasi kepada beberapa pihak yang masih belum mengirimkan surat respon, diantaranya: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Komisi Pemilihan Umum, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Komisi Informasi Pusat.
2. Selanjutnya, komitmen dan indikator yang disepakai pada hari ini akan dituangkan dalam dokumen Rencana Aksi OGI dan akan dikirim kepada OGP pada akhir bulan Oktober. Kemudian, pada bulan November 2018 nanti akan dilakukan launching Renaksi OGI.
3. Terkait dengan target triwulan, Sekretariat akan membuat draft dan mengundang Kementerian/ Lembaga untuk dapat membahas bersama terkait target tersebut.